

## ANALISIS MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN SUBKONTRAKTOR PADA UNIT ADMINISTRASI PERUSAHAAN KONSTRUKSI BUMN

Naiya Putia Alsaqina<sup>1)</sup>, Evita Puspitasari, SE., M.Si., Ak.<sup>2)</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Correspondence		
Email: <a href="mailto:Naiya20001@mail.unpad.ac.id">Naiya20001@mail.unpad.ac.id</a> <sup>1)</sup> , <a href="mailto:evita.puspitasari@unpad.ac.id">evita.puspitasari@unpad.ac.id</a> <sup>2)</sup>		No. Telp:
Submitted: 13 Juni 2024	Accepted: 19 Juni 2024	Published: 20 Juni 2024

### ABSTRACT

*The financial crisis caused several construction companies that are members of BUMN Karya to experience debt bankruptcy. These companies face serious challenges due to the lack of transparency in the payment process to subcontractors, resulting in delays or even denials of subcontractors' payment rights after completing their work. Transactions between the main contractor and subcontractors often involve large amounts, according to the level of administrative complexity that must be handled. Therefore, it is important to analyze the subcontractor's bill payment procedure on the administrative unit with the aim of improving efficiency, reducing risks, and maintaining good relations between the two parties. This study is a qualitative research that uses analytical descriptive methods to describe and explain data related to the Subcontractor Bill Payment Mechanism in the administrative unit of state-owned construction companies. Based on the results of the research, it is known that to make payments, subcontractors are required to submit 13 different documents. Bill payments to Subcontractors are made and can be monitored in real time through the online verification page.*

**Keywords:** Construction Project, Contractor, Subcontractor, Payment, Bill

### ABSTRAK

Krisis Keuangan menyebabkan beberapa perusahaan konstruksi anggota BUMN Karya mengalami pailit utang. Perusahaan-perusahaan ini menghadapi tantangan serius akibat kurangnya transparansi dalam proses pembayaran kepada para subkontraktor, yang berakibat pada penundaan atau bahkan penolakan hak pembayaran subkontraktor setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Transaksi antara kontraktor utama dan subkontraktor sering kali melibatkan jumlah yang besar, sesuai dengan tingkat kompleksitas administrasi yang harus ditangani. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis prosedur pembayaran tagihan subkontraktor pada unit administrasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan Mekanisme Pembayaran Tagihan Subkontraktor pada unit administrasi Perusahaan konstruksi BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk melakukan pembayaran, subkontraktor diminta untuk menyerahkan 13 dokumen berbeda. Pembayaran tagihan kepada Subkontraktor dilakukan dan dapat dipantau secara real time melalui laman verifikasi *online*.

**Kata Kunci:** Proyek Konstruksi, Kontraktor, Subkontraktor, Pembayaran, Tagihan

### PENDAHULUAN

Krisis Keuangan menyebabkan beberapa perusahaan konstruksi yang termasuk BUMN Karya mengalami pailit utang. Perusahaan-perusahaan ini menghadapi tantangan serius akibat kurangnya transparansi dalam proses pembayaran kepada para subkontraktor, yang berakibat pada penundaan atau bahkan penolakan hak pembayaran subkontraktor setelah menyelesaikan pekerjaan mereka (Story, 2021). Beberapa perusahaan bahkan memilih untuk membayar utang dengan cara yang tidak konvensional, seperti melalui kepemilikan saham yang nilai jualnya fluktuatif. Oleh karena itu, untuk menghindari krisis keuangan yang serupa, penting bagi perusahaan konstruksi BUMN untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga dengan mekanisme yang jelas dan transparan (Stewardson et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran tagihan subkontraktor pada Unit Administrasi Perusahaan konstruksi BUMN dengan lengkap dan

komprehensif.

Pemilik (*owner*) adalah pihak terpenting dalam sebuah proyek konstruksi. Pemilik memegang kendali penuh terhadap hasil proyek setelah pembangunan selesai (Clough et al., 2015). Peran dan tanggung jawab pemilik tidak hanya kepemilikan, tetapi meliputi inisiasi, perencanaan, dan pengawasan proyek. Mereka memiliki tanggung jawab dalam menentukan kriteria keberhasilan proyek, memastikan kualitas pekerjaan, dan mengelola keuangan proyek. Dalam suatu proyek, penting bagi pemilik proyek untuk memilih kontraktor yang memiliki modal, sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan pengalaman perusahaan yang memadai (Anggraini et al., 2017). Selain itu, pemilik proyek juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola aspek keuangan proyek yang merupakan faktor penilaian kelayakan.

Kontraktor utama dalam industri konstruksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek konstruksi secara keseluruhan, mereka bekerja sama dengan subkontraktor dan supplier untuk menyediakan jasa dan bahan yang diperlukan dalam proyek tersebut (Gunawan et al., 2022). Kontraktor utama memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi dengan mengoordinasikan semua pihak terkait, termasuk subkontraktor (Afandi & Abduh, 2022). Selain itu, kontraktor utama juga harus memastikan bahwa subkontraktor yang dipilih dapat bekerja sesuai dengan arahan dan rencana proyek yang telah ditetapkan. Kontraktor utama juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa subkontraktor memenuhi persyaratan teknis dan kualitas yang ditetapkan dalam proyek (Sucipto et al., 2017).

Kontraktor utama sering kali terlibat dalam pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Dalam upaya ini, perusahaan akan mempertimbangkan berbagai pihak ketiga untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan operasional (Utojo, 2019). Transaksi antara kontraktor utama dan subkontraktor sering kali melibatkan jumlah yang besar, sesuai dengan tingkat kompleksitas administrasi yang harus ditangani. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis prosedur pembayaran tagihan subkontraktor pada unit administrasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

Kerja sama antara kontraktor utama dan subkontraktor memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Menurut (Clough et al., 2015) subkontraktor adalah Perusahaan konstruksi yang berkontrak dengan kontraktor utama, dan memiliki privasi kontrak dengan kontraktor utama untuk kinerja dari bagian yang ditetapkan dari pekerjaan pada sebuah proyek. Kontraktor utama dapat mengandalkan subkontraktor dalam mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus yang dibutuhkan pada proyek konstruksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanuwijaya & Tamtana (2018), pemilihan subkontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi reputasi subkontraktor, pengalaman kerja sebelumnya, kemampuan teknis, keandalan, harga, dan kemampuan finansial. Ketika kontraktor utama melibatkan perusahaan khusus untuk melakukan bagian tertentu dari keseluruhan proyek konstruksi, kedua belah terikat dalam kontrak yang disebut perjanjian subkontraktor. Perjanjian subkontraktor ini akan memegang banyak tanggung jawab yang disepakati kontraktor utama untuk memenuhi permintaan pemiliknya dan akan menetapkan layanan yang tepat bagi subkontraktor untuk menyediakan dan elemen spesifik dari pekerjaan yang akan dilakukan.

Mekanisme pembayaran dalam perusahaan jasa konstruksi harus mempertimbangkan penjadwalan produksi yang efisien. Penjadwalan produksi adalah proses pengambilan keputusan yang rutin digunakan dalam industri konstruksi, yang melibatkan berbagai

faktor seperti jenis dan jumlah pekerjaan, perkiraan waktu penyelesaian, batas waktu, dan kondisi pekerjaan yang dihadapi (Livia & Oktiarso, 2017). Selain itu, dalam mekanisme pembayaran di perusahaan jasa konstruksi, ada beberapa faktor penentu keberhasilan proyek yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut mencakup jangka waktu perencanaan, pengerjaan, pengadaan, metode pembayaran, arus kas, asuransi dan jaminan, pengalaman perusahaan, reputasi, sistem manajemen perusahaan, kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, dan situasi politik (Sihombing et al., 2015).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis dalam penulisan hasilnya. Menurut (Nazir, 2011), metode deskriptif analitis adalah cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan cara mendeskripsikan berdasarkan kenyataan saat penelitian dilakukan.

### 1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perusahaan-perusahaan konstruksi yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan BUMN memiliki karakteristik yang unik dalam hal struktur organisasi, regulasi, dan tata kelola dibandingkan dengan perusahaan swasta

### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari unit-unit administrasi yang terlibat dalam salah satu proyek perusahaan konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemilihan sampel dilakukan secara purposif untuk memastikan representasi yang adekuat dari berbagai fungsi administrasi yang relevan dalam konteks proyek konstruksi tersebut (Sugiyono, 2013).

### 3. Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama Staf *Finance, Accounting & Tax* (FAT) di salah satu proyek konstruksi. Selain itu, ada pula data sekunder yang berasal dari peraturan dan perjanjian yang ditulis tim legal proyek, namun tidak dipublikasikan secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dokumen Pendukung

Subkontraktor sebagai pihak kedua, dipercaya oleh PT. X sebagai pihak pertama untuk melakukan pekerjaan jasa. PT. X akan melakukan pembayaran berdasarkan penyelesaian dan penyediaan ketentuan Pekerjaan yang baik dan benar sebagaimana didefinisikan di *Special Terms and Condition* yang dilampirkan tertera pada Surat Perjanjian Subkontraktor dan *General Terms and Condition*. Berikut dokumen yang dibutuhkan dalam mekanisme pembayaran tagihan subkontraktor pada Unit Administrasi beserta penjelasannya:

#### 1) Invoice

Invoice adalah dokumen resmi yang disusun oleh subkontraktor sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. Dokumen ini mencakup rincian lengkap tentang pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk deskripsi pekerjaan dan total nilai pembayaran yang ditagihkan.

#### 2) E-faktur pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. Per-16/PJ/2014, E-faktur pajak adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi ataupun sistem elektronik yang disediakan DJP.

#### 3) E-NOFA

Nomor faktur pajak elektronik adalah salah satu komponen yang diperlukan untuk

pengusaha kena pajak (PKP) dalam melakukan pengelolaan e-faktur pajak dan berperan penting dalam memastikan pembayaran tagihan pajak dilakukan secara akurat, sah, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

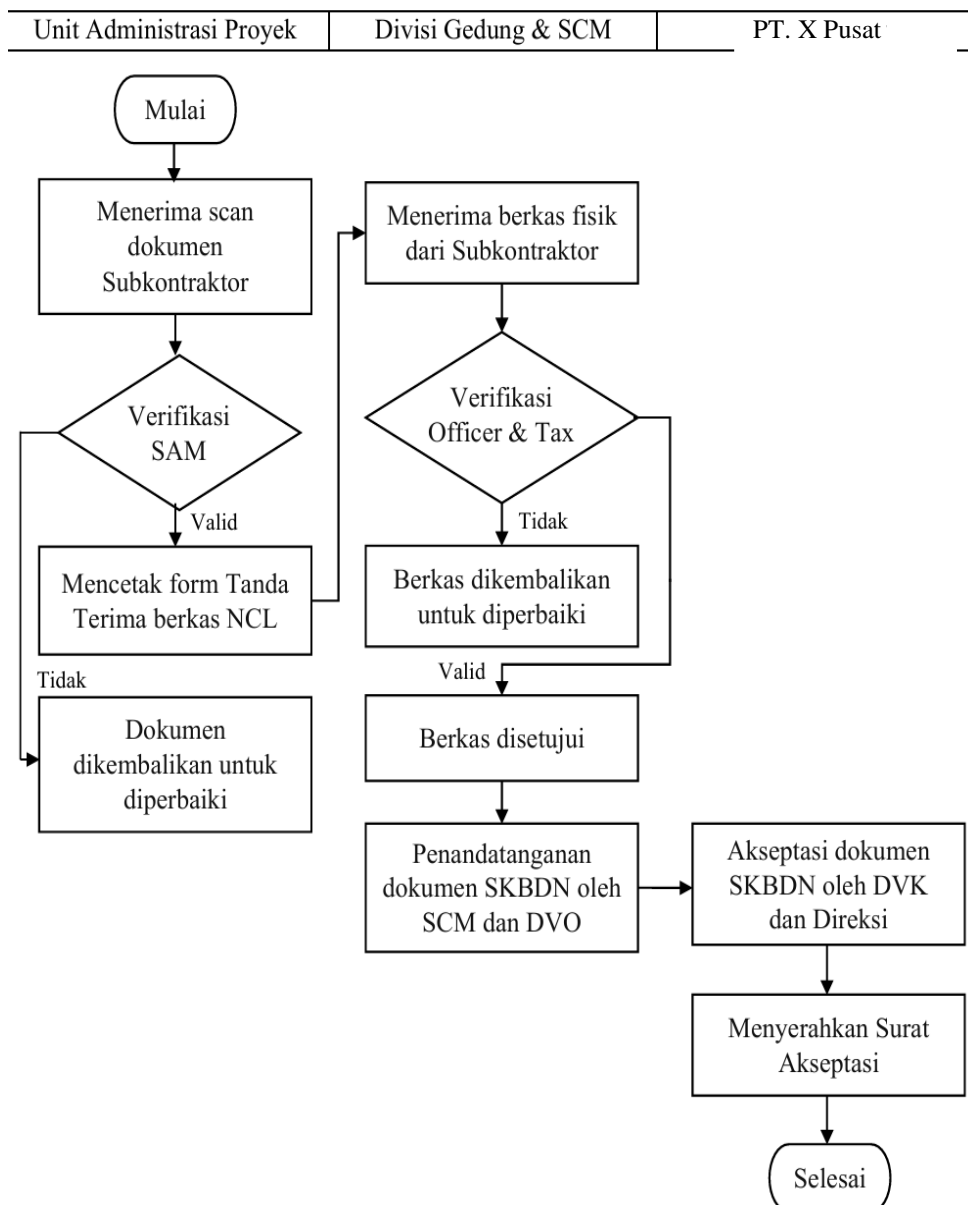
- 4) Salinan SPT Masa PPN untuk masa terakhir yang telah jatuh tempo  
Salinan SPT Masa PPN untuk masa terakhir yang telah jatuh tempo merujuk pada salinan dokumen tersebut yang mencakup periode waktu terakhir dan menunjukkan bahwa subkontraktor telah melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN.
- 5) Salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak  
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh DJP yang menyatakan bahwa subkontraktor tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban pajak tertentu. Jika subkontraktor memiliki SKB Pajak, maka salinan SKB tersebut harus dilampirkan.
- 6) Salinan PO yang sudah ditandatangani Para Pihak.  
PO (*Purchase Order*) merupakan dokumen berisi ketentuan-ketentuan pekerjaan yang ditugaskan oleh PT. X kepada subkontraktor. Dokumen ini memuat permintaan pekerjaan yang kemudian dapat dirincikan menjadi detail pekerjaan.
- 7) Berita Acara Lapangan (BAL)  
Berita Acara Lapangan (BAL) adalah dokumen yang berisi catatan resmi yang dibuat setelah melakukan peninjauan lapangan terkait progres atau penyelesaian pekerjaan. Salinan BAL yang dibutuhkan harus menyatakan persentase penyelesaian pekerjaan.
- 8) Berita Acara Pembayaran  
Berita Acara Pembayaran adalah dokumen yang berisi perincian tentang perhitungan nilai invoice yang harus dibayarkan. Dokumen ini mencakup informasi seperti item-item yang di invoice, jumlah yang harus dibayar untuk tiap item, dan total tagihan.
- 9) *Work Order* (untuk Perjanjian Non-OA)  
*Work Order* adalah dokumen yang berisi instruksi resmi yang diberikan kepada subkontraktor untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam proyek konstruksi. Dokumen ini berisi rincian pekerjaan yang harus dilakukan, jangka waktu, spesifikasi pekerjaan, dan informasi lain yang relevan.
- 10) Invoice SKBDN  
Invoice SKBDN merupakan dokumen yang diserahkan oleh subkontraktor atas bukti penerimaan pembayaran, dokumen ini nantinya diperlukan untuk memproses pembayaran SKBDN. Invoice harus mencantumkan nama pekerjaan, berikut rincian no. kontrak, no. WO, total harga, dan nomor pembayaran SKBDN beserta tanggal SKBDN.
- 11) Berita Acara Pembayaran SKBDN  
BAP SKBDN adalah dokumen yang digunakan oleh Divisi Gedung PT. X untuk dapat memproses pembayaran SKBDN kepada pihak subkontraktor. Dokumen ini ditandatangani oleh *Senior Manager-Supply Chain Department* dan Direktur dari pihak subkontraktor sebagai persetujuan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.
- 12) Berita Acara *Progress* Pekerjaan SKBDN  
Dokumen ini memuat nama pekerjaan, nomor kontrak, dan nomor work order, serta nominal yang ditagihkan. Hal ini sebagai dokumen pembayaran SKBDN yang diwajibkan bank untuk diserahkan oleh PT. X sebagai pemohon.
- 13) Surat Aksep dan Sanggup Bayar  
Surat ini akan menyatakan kesediaan perusahaan untuk melakukan pendebitan akun rekening guna memproses pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera dalam BAP SKBDN.

## 2. Mekanisme Pembayaran Tagihan Subkontraktor

Mekanisme pembayaran tagihan kepada subkontraktor dimulai dari penerimaan invoice dan dokumen pendukung hingga mendapatkan persetujuan dari divisi gedung pusat untuk diproses, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam General Terms and Condition Pasal 7 tentang Pembayaran dan Prosedur Penagihan. Di salah satu proyek konstruksi PT. X menggunakan metode pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Letter of Credit (L/C)* kepada subkontraktor. Untuk itu, pencatatan dan pengarsipan pembayaran dilakukan melalui web verifikasi online. Adapun alasan PT. X menggunakan metode pembayaran SKBDN dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pembayaran kepada Subkontraktor akan dijamin dengan nominal yang tepat dan tepat waktu.
- b) Dilakukan untuk mengurangi risiko transaksi tidak terlunasi.
- c) Memberikan keamanan pembayaran bagi kedua pihak, yaitu pemohon dan penerima pembayaran.
- d) Meningkatkan perlindungan dalam proses penyelesaian transaksi keuangan dengan jumlah besar.

Berikut diagram alur terkait mekanisme pembayaran tagihan Subkontraktor secara ringkas.



*Flowchart* di atas menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan pembayaran tagihan kepada subkontraktor pada Unit Administrasi PT. X.

1. Menerima *scan* dokumen Subkontraktor

Proses pembayaran tagihan kepada subkontraktor diawali dengan subkontraktor menyerahkan *soft copy* tagihan kepada unit administrasi proyek. Dokumen ini diserahkan melalui laman *e-procurement*. Dokumen yang diserahkan setidaknya terdiri atas Berita Acara Pembayaran (BAP), Berita Acara Lapangan (BAL), dan kontrak.

2. Verifikasi SAM

Dokumen yang diterima akan di cek kelengkapannya terlebih dahulu. Sangat jarang terjadi kekurangan berkas pada tahap ini. Selanjutnya dokumen akan di verifikasi oleh Staf *Finance, Accounting & Tax* (FAT) dan *Site Administration Manager* (SAM) untuk mengecek kebenaran dokumen. Apabila ditemukan kesalahan pada dokumen yang diserahkan, maka dokumen akan dikembalikan kepada subkontraktor untuk dilakukan perbaikan. Sementara itu, dokumen yang valid akan diterima dan disiapkan untuk proses selanjutnya.

3. Mencetak form Tanda Terima berkas NCL

Setelah disetujui oleh SAM, selanjutnya data dokumen akan di *upload* ke laman verifikasi *online*

Setelah melakukan input dokumen, akan mendapatkan bukti berupa nomor TTNCL (Tanda Terima *Non Cash Loan*). Nomor TTNCL akan digunakan oleh subkontraktor untuk mengirim berkas fisik tagihan ke Divisi Gedung.

4. Menerima berkas fisik dari Subkontraktor

Subkontraktor menyerahkan berkas fisik beserta berkas TTNCL ke Divisi Gedung.

5. Verifikasi

Setelah menerima berkas, staf verifikasi dan staf pajak akan memverifikasi dan memvalidasi kembali berkas fisik dan data di front-end. Jika ada kesalahan, berkas akan dikembalikan kepada subkontraktor untuk diperbaiki. Berkas yang telah divalidasi akan ditandatangani oleh Off-Ver.

6. Penandatanganan dokumen SKBDN oleh SCM dan DVO

Dokumen yang sudah valid harus ditandatangani oleh SM-SCM dan SVP-Ops. Adapun peninjauan terhadap perkembangan verifikasi tagihan dapat dilihat dari web verifikasi online. Setelah berkas BAP dan BAPS ditandatangani, berkas akan diserahkan kepada subkontraktor untuk kemudian diajukan pencairan dana ke Bank.

7. Akseptasi dokumen SKBDN oleh DVK dan Direksi

Setelah Menerima berkas SKBDN, Bank akan menyerahkan form *acceptance/unacceptance*. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada Divisi Keuangan (DVK) dan Direksi perusahaan. Langkah ini diambil untuk memperoleh persetujuan guna menerbitkan Surat Aksep Dan Kesanggupan Pembayaran yang akan diajukan kepada bank sebagai permintaan pembayaran.

8. Menyerahkan Surat Akseptasi

PT. PP (Persero) Tbk akan menyerahkan surat akseptasi ke bank. Bank akan memproses pembayaran sesuai data yang tertera pada dokumen swift dan surat akseptasi, subkontraktor akan memperoleh hak untuk melakukan pencairan dana.

## SIMPULAN

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang ditagihkan oleh subkontraktor pada Unit Administrasi PT. X yaitu: i) Invoice, ii) E-faktur pajak, iii) E-NOFA, iv) Salinan SPT Masa PPN untuk masa terakhir yang telah jatuh 31 tempo, v) Salinan Surat Keterangan Bebas (SKB), vi) Salinan PO yang sudah ditandatangani Para Pihak, vii) Berita Acara Lapangan (BAL), viii) Berita Acara Pembayaran, ix) Work Order (untuk

Perjanjian Non-OA), x) Invoice SKBDN, xi) Berita Acara Pembayaran SKBDN, xii) Berita Acara Progress Pekerjaan, xiii) Surat Aksep dan Sanggup Bayar. Sementara itu, Mekanisme pembayaran tagihan kepada subkontraktor pada Unit Administrasi PT. X yaitu: 1) Menerima scan dokumen Subkontraktor, 2) Verifikasi SAM, 3) Mencetak form Tanda Terima berkas NCL, 4) Menerima berkas fisik dari Subkontraktor, 5) Verifikasi, 6) Penandatanganan dokumen SKBDN oleh SCM dan DVO, 7) Akseptasi dokumen SKBDN oleh DVK dan Direksi, 8) Menyerahkan Surat Akseptasi.

## SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Magang Prodi yang dilaksanakan di Unit Administrasi PT. X, praktikan dapat memberikan rekomendasi dan usulan untuk PT. X, yaitu terkait kartu utang. Arsip kartu utang di web *front-end* saat ini kurang informatif, dan hanya memunculkan saldo utang per vendor. Tampilan *user interface* membatasi tampilan, sehingga data kartu utang tidak terintegrasi secara real time. Alangkah baiknya apabila PT. X bisa mempertimbangkan pembaruan untuk web front-end agar dapat menyajikan data kartu utang yang informatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y., & Abduh, M. (2022). Studi Aspek-Aspek Yang Memengaruhi Kontraktor Utama Dalam Pemilihan Subkontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 2(1).
- Anggraini, L., Rahmawati, D., & Widorini, T. (2017). Analisis Pengaruh Kualifikasi Kontraktor Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi Di Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Rekayasa Dan Teknologi*, 1(2), 28–72.
- Clough, R. H., Sears, G. A., Sears, S. K., Segner, R. O., & Rounds, J. L. (2015). *Construction contracting: A practical guide to company management*. John Wiley & Sons.
- Gunawan, D., Alfari, S., Ichsan, N., Basri, H., & Mulyawan, A. R. (2022). Implementasi Metode Prototype Dalam Perancangan Sistem Informasi Upah Pasang Material Konstruksi. *Bina Insani Ict Journal*, 9(1), 73–82.
- Livia, C. Y., & Oktiarso, T. (2017). Penjadwalan Untuk Meminimalkan Total Tardiness Dengan Metode Integer Linear Programming. *Jurnal Teknik Industri*, 18(2), 127–137.
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh. *Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia*.
- Sihombing, D. J. C., Santoso, A. J., & Rahayu, S. (2015). Model Perangkingan Proyek Kontruksi Pada Asosiasi Kontraktor Menggunakan Fuzzy AHP. *Scientific Journal of Informatics*, 2(1), 73–81.
- Stewardson, A., Edwards, D. J., Asamoah, E., Aigbavboa, C. O., Lai, J. H. K., & El-Gohary, H. (2023). The late payment epidemic in UK construction. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 28(3), 374–397. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-03-2022-0016>
- Story, N. (2021, July 20). *Subcontractor Strategies to Maximize Payment in Bankruptcy*. Construction Executive. <https://www.constructionexec.com/article/subcontractor-strategies-to-maximize-payment-in-bankruptcy>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tanuwijaya, E., & Tamtana, J. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kontraktor utama dalam pemilihan subkontraktor pada pelaksanaan proyek konstruksi. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 111–121.
- Utojo, H. I. (2019). *Manajemen pengadaan barang dan jasa*. Deepublish.